

## Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023

Muhamad Iqbal Muttaqin<sup>1</sup>, Ane Permatasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dikirimkan: 18 Juni 2023

Direvisi: 26 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

### INTISARI

Ancaman resesi global tahun 2023 yang disebabkan oleh implikasi pandemi covid-19, kenaikan suku bunga acuan dan krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina telah melanda sejumlah negara di dunia seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dikhawatirkan ancaman resesi ini terjadi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Negara Indonesia dalam mengimplementasikan konsep *agile government* untuk menghadapi ancaman resesi global. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang berlandaskan teori *agile governance* serta menjadikan prinsip-prinsip *agile governance* sebagai indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan langkah atau kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dengan berlandaskan enam prinsip dari teori *agile governance* yang dikemukakan oleh Luna, Moura dan Kruchten. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *good enough governance*, *business-driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach* dan *simple design and continuous refinement*. Hal tersebut dibuktikan dengan peresmian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2023 sebagai upaya pengintegrasian digital UMKM, APBN yang didesain untuk menghadapi ancaman resesi, penghimpunan masyarakat untuk membuka atau mengembangkan UMKM, perbaikan iklim investasi, pengeluaran kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah, serta peluncuran beberapa langkah taktis oleh Kemendagri RI dalam merespons ancaman ini.

### KATA KUNCI

Agile Government, Resesi Global 2023, Pemerintah

### Pendahuluan

Sekarang ini, pandemi covid-19 telah berakhir dan hampir seluruh negara telah membebaskan penduduknya untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun perlu disadari, pandemi covid-19 yang melanda hingga 3 tahun lamanya ternyata memberikan implikasi buruk terhadap global khusus pada aspek ekonomi. Pasalnya, selama pandemi setiap pemerintah negara berfokus untuk mengatasi wabah covid-19 dengan menerapkan batasan-batasan segala aktivitas sosial, termasuk ekonomi. Akibatnya,

### Korespondensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Email: [muhamad.iqbal.isip20@mail.umy.ac.id](mailto:muhamad.iqbal.isip20@mail.umy.ac.id)

pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi atau penurunan secara drastis. Oleh karena itu, saat ini seluruh negara sedang berbondong-bondong untuk melakukan perbaikan terhadap ekonomi, termasuk di Indonesia sendiri yang telah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi sejak akhir tahun 2020.

Seiring berjalannya waktu, meskipun pemulihan ekonomi telah berjalan cukup baik akan tetapi memasuki tahun 2023 banyak sekali isu atau wacana dari beberapa lembaga di dunia yang menyampaikan kekhawatirannya bahwa akan terjadi kembali resesi ekonomi global. Seperti konsensus yang disepakati oleh salah satu lembaga internasional yakni *International Monetary Fund* (IMF), menyatakan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi kurang dari 2,5 persen, maka ekonomi dunia dapat digolongkan berada dalam resesi (Priambodo, 2023). Bank Dunia dalam laporan berjudul "*Is a Global Recession Imminent?*" juga memprediksi resesi global kemungkinan akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Prediksi tersebut terasa semakin nyata ketika melihat sejumlah indikasi yang telah terjadi, salah satunya terjadi peningkatan suku bunga acuan secara signifikan oleh bank sentral di sejumlah negara guna meredakan lonjakan inflasi (Mahdiyan, 2023). Selain itu menurut *World Economic Forum* (WEF) dalam laporan *Global Risks Report 2023*, terdapat lima hal yang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global di antaranya tingginya tingkat inflasi, krisis pasokan makanan, krisis pasokan energi, krisis biaya hidup hingga serangan siber pada infrastruktur penting (Rachman, 2023).

Sebelum lebih jauh lagi membahas penyebab dan dampak dari resesi 2023, resesi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi secara agresif pada suatu wilayah tertentu. Pada umumnya, terjadinya resesi ditandai dengan penyusutan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal atau lebih secara Resesi biasanya ditandai dengan terkontraksinya Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal atau lebih secara beruntun. Penyebab umum terjadinya resesi antara lain tingkat inflasi yang tinggi, tingkat deflasi yang signifikan, guncangan ekonomi yang mendadak serta pengelolaan utang yang tidak sehat (Fiskal Kemenkeu, 2022). Sedangkan penyebab terjadinya resesi yang dikhawatirkan terjadi pada tahun ini selain pandemi COVID-19 dan kenaikan suku bunga acuan adalah perang Rusia-Ukraina, dimana perang tersebut telah mengusik rantai pasokan global terutama pada sektor energi dan pangan. Hal tersebut telah menimbulkan krisis dan kenaikan laju inflasi yang menyebabkan kehilangan PDB global sebanyak USD2,8 triliun (Mahdiyan, 2023).

Beberapa negara yang dipastikan mengalami resesi global 2023 menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia di antaranya China, Eropa, Inggris dan Amerika Serikat (C. A. Putri, 2022). Di Amerika Serikat, berdasarkan indeks *The Personal Consumption Expenditures* (PCE) inflasi AS mencapai 5,1% pada Februari 2022. Dilematis yang dirasakan Bank Sentral AS (Fed), jika menaikkan suku bunga untuk mengatasi lonjakan inflasi, maka akan memukul perbankan, pebisnis dan korporasi pengutang besar. Resesi akan diperkirakan terus berlanjut karena terlihat dari pola investasi di pasar, dimana banyak investor yang enggan berinvestasi dalam jangka panjang (Saragih, 2023). Sama halnya dengan Amerika Serikat, resesi ekonomi di Negara Inggris semakin terasa nyata. Menurut Lembaga Pertanggungjawaban Anggaran Inggris dan Dana Moneter Internasional pada menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini mendekati nol dan inflasi lebih dari 10%. Beberapa kondisi yang menunjukkan keadaan

ekonomi dan keuangan warga Inggris buruk adalah seperti harga rumah dan penyewaan properti yang mahal, inflasi di sektor bahan-bahan pokok mencapai 17,1% serta pasokan makanan segar di supermarket menurun.

Meskipun masih bersifat indikatif atau ancaman, resesi global 2023 perlu kita persiapkan upaya penanganannya baik secara strategis maupun taktis agar tidak terjadi di negara Indonesia, pun jikalau terjadi setidaknya Indonesia tidak mengalami resesi secara besar-besaran. Terlebih lagi, permasalahan ekonomi di Indonesia masih cukup kompleks terutama pada pengembangan UMKM. Hal tersebut mulai dari permasalahan modal yang terbatas dimana 74% UMKM di Indonesia terkendala karena kesulitan dalam mencari modal, urusan perizinan yang rumit, kurangnya inovasi pemilik dalam mengembangkan UMKM hingga masih banyaknya UMKM yang belum terintegrasi pada teknologi dan digital (Sandi, 2023). Tentu dalam menangani hal ini, pemerintah memiliki peranan yang vital atau penting terutama dalam mengeluarkan segala kebijakan atau keputusan. Selain itu, fondasi atau tata kelola pemerintah di dalamnya juga harus terus ditingkatkan dan melek terhadap perkembangan global saat ini terutama dalam hal teknologi digital. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi konsep *agile government* pada pemerintah Indonesia dalam menghadapi indikasi resesi global 2023. Seperti yang kita ketahui juga, konsep *agile government* adalah konsep terbaru yang saat ini sedang ramai diterapkan oleh beberapa negara di dunia. *Agile government* atau pemerintahan cergas adalah pemerintah yang responsive dan lincah (yang biasanya banyak dimiliki oleh perusahaan swasta) yang memiliki struktur organisasi yang adaptif, dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan baik serta dapat mengantisipasi lingkungan disruptif di berbagai sektor (Kumorotomo, 2019).

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang meneliti fenomena implementasi konsep *agile government* di Indonesia, salah satu topik penelitian yang cukup banyak dikaji sejak tiga tahun terakhir adalah bagaimana *agile government* ini dapat mengatasi krisis negara akibat pandemi COVID-19. Seperti yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad, Sobari, Hakim, 2022) tentang konsep tata kelola adaptif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana peneliti menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan *adaptif local goverance* dalam menangani pandemi covid-19 melalui sentralisasi dari hubungan pemerintah pusat-daerah. Mengacu pada peraturan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020, tata kelola adaptif yang dilakukan berbentuk penguatan jejaring sosial, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kemudian, peneliti yang bernama (Apriliyanti, Latif, Mutiarin, 2021) juga menyampaikan bahwa salah satu prinsip dari konsep *agile governance* yakni *based on quick wins* secara dominan dapat menstimulasi antar kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga dengan upaya tersebut, meskipun terdapat indikasi pengaruh buruk dari budaya Arek Suroboyo yakni *cangkrukan* pada gelombang mendatang, Kota Surabaya tergolong berhasil melewati gelombang pertama pandemi covid-19 dengan baik.

Kemudian, ada pula penelitian yang dilakukan oleh (Fariz & Nadjib, 2020) yang memaparkan beberapa strategi implementasi konsep *agile governance* pada masa pandemi covid-10 di Pemerintah Kabupaten Muratara yakni: a) Penguatan jaringan tim; b) Penyebarluasan visi kepada semua anggota, pengukuran peluang yang ada, pemanfaatan sumber daya yang luwes, serta petunjuk yang jelas; c) Pengembangan

sarana teknologi dan sumber daya pengelola teknologi; d) Invertarisasi pekerjaan. Pada tahun yang sama, penelitian yang dilakukan oleh (Sagala et al., 2021) juga menegaskan bahwa sebuah krisis dapat memfasilitasi transformasi pemerintah menuju pemerintahan yang adaptif, hal tersebut terlihat dari perbaikan mekanisme kebijakan dan pemberian respon yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Namun di samping itu, *Agile Governance* pada umumnya bersifat reaktif sehingga tidak menjamin dapat memberikan dampak positif terhadap penanganan suatu krisis. Tantangan dalam penerapan *agile government* dirasakan juga oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana peneliti (Gaffar, 2022) menyebut bahwa realisasi vaksin yang rendah di Kalsel disebabkan oleh adanya penolakan secara besar-besaran dari masyarakat setempat terhadap kebijakan wajib vaksin, sehingga perlu adanya pemahaman kembali terkait konsep *agile governance*.

Selain topik yang berkaitan dengan masalah kesehatan, konsep *agile government* juga dapat menjawab krisis yang terjadi pada internal birokrasi pemerintah di Indonesia. Seperti yang pertama dalam segi pelayanan publik, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (S. B. Putri et al., n.d.) dimana hasil menyatakan bahwa melalui penerapan konsep *agile government*, salah satu komunitas yang bernama Permuda Giri Tirta di Kabupaten Gresik dalam pelayanan publik sudah: a) *Business Driven*, melakukan kerja sama dengan swasta; b) *Humas Focus*, pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat; c) *Based On Quick Wins*, pengaduan yang dilakukan oleh para konsumen dapat terakomodir dengan baik dan efektif melalui aplikasi gita ceria mobile; d) *Adaptive Approach*, pegawai perumda mampu meningkatkan kemampuan/wawasan serta inovasi dalam bekerja melalui pelatihan yang ada. Sedangkan yang kedua, penelitian yang mengambil studi kasus pemerintah oleh (Zahra et al., 2022) menjelaskan bahwa penerapan *agile governance* di Pemkot Bandung dinilai sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Namun penerapannya masih belum optimal terutama pada indikator *Humas Focused* yang menyediakan ruang pengaduan masyarakat, dimana pemerintah dinilai kurang responsif sehingga tidak memenuhi harapan masyarakat.

Masih dengan krisis pada internal birokrasi, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2022) yang berfokus pada permasalahan mengenai motivasi kinerja karyawan. Hasil penelitian menyebut bahwa dibanding organisasi *agility* dan kepemimpinan transformational, komponen *e-government* yang merupakan produk dari konsep *agile government* itu sendiri dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap motivasi kerja pegawai di Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dalam menghadapi era *new normal*. Adapun fokus lainnya yakni transformasi inovasi, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan *agile governance* menurut penelitian (Kurniawan et al., 2021) memiliki sejumlah aspek penting mulai dari egaliter, komunikasi terbuka, transparansi, koordinasi yang terstruktur, berjejaring dan otonom, manajer dan inovasi serta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Terakhir, masih dengan fokus yang sama yakni peneliti (Zulyani, 2020) juga menyebut bahwa reformasi birokrasi tentu hadir dalam memperbaiki bobroknya birokrasi di Indonesia bahkan mencapai birokrasi berkelas dunia. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka pengupayaan terpenting adalah memfokuskannya dalam memperbaiki

kualitas pelayanan yang dilakukan oleh ASN dengan menerapkan prinsip-prinsip *agile government*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, *gap* atau novelty dari penelitian adalah berfokus untuk mengukur seberapa efektif dan seberapa pengaruh konsep *agile government* dalam mengatasi sebuah krisis ekonomi di lingkup global yang bernama resesi yang sifatnya ancaman dan indikatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni melakukan analisis implementasi konsep *agile government* terhadap fenomena yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia yakni resesi global 2023. Selain itu, peneliti juga akan menyajikan sejauh mana langkah-langkah atau mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik secara strategis maupun taktis dalam menghadapi fenomena ini melalui perspektif *agile government*.

Untuk memudahkan analisis data, peneliti menggunakan teori *agile governance* yang dikemukakan oleh (Luna et al., 2015), dimana teori ini berawal dari konsep perangkat lunak (*software development*) yang dikembangkan yakni *agility* yang selanjutnya konsep tersebut dikaji pada lingkup studi lain, termasuk di studi organisasi. Konsep *agility* berarti cepat, luwes dan gesit yang diterapkan pada sebuah organisasi guna merespons suatu permasalahan. Sehingga, organisasi akan terpacu untuk terus memperbaiki sistem melalui hasil evaluasi dari kesalahan yang ada (Busri, 2022). Konsep *agile governance* merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk dapat merespons dan beradaptasi dengan berkelanjutan dan cepat terhadap perubahan yang ada melalui penggabungan kemampuan tata kelola dan kemampuan gesit secara terkoordinasi untuk memberikan nilai tambah yang baik, cepat dan murah untuk proses pengembangan pada tatanan organisasi. Menurut (Luna et al., 2015) terdapat 6 (enam) prinsip *agile governance* yang dapat memandu dan mendukung sebuah organisasi untuk mencapai *output* yang optimal. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu *good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement*.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan suatu jawaban mengenai pengertian, makna, karakteristik, konsep, simbol, gejala, maupun deskripsi terhadap suatu fenomena atau kejadian (Yusuf, 2014). Metode tersebut biasanya berupa wawancara, observasi, dan penafsiran dokumen. Sedangkan, untuk pendekatan studi kepustakaan sendiri ialah sebuah metode untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai referensi pustaka yang berkaitan dengan nilai, budaya maupun norma yang berkembang pada fenomena sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data yang dilakukan mulai dari pencarian, pengumpulan dan penelaahan terhadap buku, literatur, dokumen, berita serta referensi-referensi tertentu yang berkaitan dengan fenomena (Nazir, 2003). Dengan metode dan pendekatan di atas, maka peneliti akan lebih muda untuk mendapatkan data-data yang lengkap, jelas dan akurat.

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui artikel, berita, buku, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang sudah ada, dimana artinya peneliti tidak dapat melihat secara langsung fenomena yang sedang diteliti namun tetap mendapatkan informasi yang bersumber dari data primer yang ada dengan teknik studi

literatur (Martono, 2010). Studi literatur adalah metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan berisi data informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Kemudian untuk teknik analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif, dimana metode ini dilakukan dengan menyajikan fakta-fakta yang didukung dengan analisis dari perspektif peneliti, tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan penjelasan dan pemahaman secukupnya (Habsy, 2017).

### **Good Enough Governance**

Prinsip *good enough governance* menitikberatkan pada tata kelola yang baik pada sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah. Indikator utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang optimal adalah pemerintah mampu berkompetisi dengan negara lain dari berbagai sektor, menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparan, berpegang pada aturan hukum, responsif dan adaptif terhadap perubahan, mementingkan kualitas pelayanan yang efisien dan efektif, serta menyukseskan suatu kebijakan melalui pendorongan partisipasi masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Soenarjanto, 2018), indikator utama dalam mewujudkan *good enough governance* adalah transparansi dan akuntabilitas, dimana konsep yang diterapkan pemerintah negara dalam mewujudkan indikator ini adalah konsep pemerintahan digital. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital dan *Information Communication Technology* (ICT) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi dan penyediaan layanan publik yang lebih baik oleh pemerintah kepada masyarakat (Yanqing, 2010). Contoh produk dari pemerintah digital sekarang ini adalah sosial media dan website pemerintah serta platform layanan perizinan dan pelaporan berbasis digital.

Dalam menghadapi ancaman resesi global 2023, selain pemerintahan yang digital, para pelaku UMKM juga saat ini sedang diupayakan agar semuanya dapat terintegrasi pada digital. Sehingga, pemerintah membentuk sebuah gerakan yang bernama Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2023 yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem UMKM yang terintegrasi digital dengan target mencapai sebesar 30 juta UMKM Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Diresmikan pada 14 Februari 2023 kemarin oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Gernas BBI memiliki sasaran penuh terhadap masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Beberapa langkah yang dilakukan oleh gerakan ini di antaranya: (1) Melakukan kampanye edukasi dan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal; (2) Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, asosiasi industri, lembaga swadaya masyarakat, media dan lembaga lainnya untuk bersama-sama mengembangkan kebijakan dalam mendukung produk lokal; (3) Memberikan apresiasi kepada pelaku UMKM yang berhasil menciptakan produk-produk inovatif dan unggulan berupa sertifikasi dan penghargaan. Melalui Gernas BBI, diharapkan mampu memperkuat para pelaku UMKM sebagai produk lokal untuk dapat bertahan dari ancaman resesi global 2023 (Romanti, 2023). Terlebih lagi, resesi ini dapat mengancam pelaku usaha tingkat atas yang memiliki nilai dollar yang tinggi dibanding usaha tingkat kecil hingga menengah yang nilai dollarnya rendah. Sehingga, UMKM memiliki ketahanan yang cukup tinggi jika terjadi resesi nantinya.

### **Business-Driven**

Prinsip *business-driven* memfokuskan pada perumusan dan pengeluaran suatu keputusan atau kebijakan yang berorientasi pada pendapatan negara. Menjelang tahun 2023, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis telah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang didesain mampu menghadapi ancaman resesi global dan membangkitkan optimisme masyarakat dalam bersaing di sektor ekonomi (Sukmana, 2022). Mulai dari pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang terintegrasi digital, revitalisasi ekonomi hijau dan industri melalui peningkatan *spending better* dan pendapatan negara, serta reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Reformasi subsidi BBM yang dimaksud adalah menekan pengeluaran untuk dapat dialokasikan pada kebutuhan belanja yang lebih produktif, seperti belanja perlindungan sosial, peningkatan sumber daya manusia (SDM), penanganan tingkat kematian anak dan ibu serta pencegahan stunting.

Beberapa rincian alokasinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam (Damara, 2023) menyampaikan terdapat anggaran untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi senilai Rp104,2 triliun yang fokus utamanya adalah mempertahankan kesediaan komoditas pangan dan meredam kenaikan harga pangan. Lalu pada sektor perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun seperti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selanjutnya di sektor energi, senilai Rp341 triliun disiapkan untuk menjaga ketahanan laju produksi energi serta memberikan subsidi BBM bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun sektor infrastruktur terutama dalam mempercepat digitalisasi kehidupan masyarakat senilai Rp392 triliun. Sebanyak Rp178 triliun untuk sektor kesehatan non-covid dan Rp612 triliun untuk sektor pendidikan.

Selain menyiapkan APBN yang mampu menahan ancaman resesi global, pemerintah Indonesia juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah Amerika Serikat dengan menyepakati Nota Kesepahaman tentang Infrastruktur dan Keuangan senilai Rp 10,2 T atau 698 juta dolar untuk mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil di Indonesia. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS, Alice Albright dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada Kamis, 13 April 2023. Selain mendukung transisi energi, kesepakatan ini juga mendorong peningkatan infrastruktur ketahanan iklim berstandar unggul yang dinaungi oleh Kemitraan PGII atau Infrastruktur dan Investasi Global (PGII). Adapun kesepakatan ini akan meluncurkan tiga proyek besar yakni: (1) Proyek ATLAS atau Aksesibilitas Transportasi dan Logistik yang bekerja sama beberapa pemerintah provinsi yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Bali dengan mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan penumpang perempuan; (2) Proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Milik Perempuan, bertujuan untuk menyediakan layanan pinjaman formal yang prima terhadap UMKM terutama yang pelaku usahanya perempuan. Selain itu, proyek ini juga didesain untuk memfasilitasi pelatihan bisnis dengan rancangan materi tentang literasi digital dan keuangan serta bantuan teknis dalam menguji kesiapan investasi dan uji layak kredit; (3) Proyek Pengembangan Pasar Keuangan atau FMD, bertujuan untuk meningkatkan

pembiayaan komersial dalam investasi infrastruktur dan partisipasi sektor swasta melalui pemberian hibah keuangan campuran dan bantuan teknis. Selain itu, proyek ini juga dapat membantu pemerintah untuk memanfaatkan dana dalam mendanai proyek infrastruktur dan membentuk kemitraan baru (U.S. Embassy, 2023).

### *Human Focused*

Prinsip *human focused* menitikberatkan pada tata kelola pemerintah yang mengedepankan partisipasi masyarakat, baik secara perwujudan transparansi dan kemudahan akses maupun peningkatan pemahaman masyarakat terhadap suatu program atau kebijakan yang ada. Munculnya isu resesi global ini tentu menggemparkan masyarakat yang baru saja berjuang untuk bertahan hidup akibat pandemi Covid-19 yang melanda kurang lebih 2 tahun setengah. Kecemasan dan ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat tentu menjadi tanggungjawab pemerintah agar harus segera mengatasinya. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam (Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, 2022) telah melakukan komunikasi publik terhadap masyarakat dengan tujuan menenangkan mereka agar tidak gelisah. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan himbauan-himbauan agar dapat mempersiapkan dana darurat dengan mencari penghasilan tambahan selain gaji tetap serta dapat melakukan investasi pada emas, surat berharga, deposito dan tempat lainnya yang diterbitkan oleh negara Indonesia, bukan negara asing (Febriani, 2022).

Selain itu melihat jumlah penduduk yang mencapai 281.864.078 jiwa berdasarkan data laporan Badan Pusat Statistik (2023), melalui program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional pemerintah ingin memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa menjadi garda terdepan dalam bertahan dan menghadapi resesi global 2023. Per-tahun 2018, sebesar 99,9% atau 64,2 juta pelaku usaha menurut Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berasal dari UMKM dan memiliki 89% daya serap tenaga kerja (News, 2022). Hal tersebut terbukti dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia karena pelaku UMKM terus bertambah. Namun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan anggaran PDB yang dialokasikan untuk sumbangan usaha mikro, hanya sekitar 37,8%. Sehingga, pemerintah akan menggandeng pihak BUMN, perbankan dan swasta agar dapat mengalokasikan anggaran UMKM yang lebih tinggi dari sebelumnya melalui pembuatan skema-skema permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku UMKM. Beberapa penjabaran eksekusi program PEN meliputi pengalokasian dana pinjaman untuk pengembangan UMKM sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan *loss limit* kredit UMKM dan penanggungungan pajak penghasilan final UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsidi bunga (PEN Kemenkeu, n.d.).

### *Based On Quick Wins*

Prinsip *based on quick wins* memfokuskan pada dorongan suatu kebijakan yang berhasil membuahkan suatu dampak atau hasil sesuai dengan harapan. Pada prinsip ini, pemerintah meluncurkan salah satu langkah paling strategis untuk menghadapi ancaman resesi global 2023 yakni dengan memperbaiki iklim investasi melalui kebijakan *One Single Submission* (OSS). Diresmikan pada 9 Juli 2018, Sistem Perizinan Terpadu



Daring atau OSS di Indonesia bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat permintaan izin usaha hanya kurang dari satu jam saja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Alhakim et al., 2021), sistem perizinan OSS sangat menguntungkan para investor dalam mendapatkan izin, sehingga iklim investasi yang meliputi institusional, kebijakan dan kondisi lingkungan yang berimplikasi terhadap tingkat risiko maupun pengembalian suatu investasi dapat berjalan dengan baik meskipun beberapa komponen perlu diperbaiki, terutama koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Baik di tingkat daerah maupun pusat, pemerintah berupaya untuk menjaga iklim investasi agar investor tertarik untuk memberikan modalnya sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Selain itu menurut laporan (Dirjen Pertimbangan Kemenkeu, 2023), pembangunan infrastruktur daerah dan investasi memiliki keterkaitan cukup erat. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal akan meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerahnya seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, kesediaan air bersih dan energi listrik dan internet dapat meningkatkan infrastruktur di daerah. Efek jangka panjangnya adalah investasi sebaliknya akan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Beberapa kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain: 1) Penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola investasi dan mengembangkan ekonomi daerah; 2) Penjalinan kerja sama dengan pihak swasta maupun kelompok masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempromosikan daerah sebagai tujuan investasi yang menarik; 3) Menyediakan beberapa insentif seperti keringanan biaya pembangunan infrastruktur, dukungan promosi serta pembebasan pajak; 4) Menyusun regulasi yang jelas dan konsisten sehingga dapat meyakinkan investor untuk mendapatkan keuntungan investasi mereka, dan; 5) Mengembangkan kualitas SDM daerah sebagai tenaga kerja agar terampil dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan industry.

### **Systematic and Adaptive Approach**

Prinsip *systematic and adaptive approach* menitikberatkan pada pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan cepat, baik dan tersistem terhadap segala dinamika maupun perubahan sosial masyarakat. Dalam merespons indikasi resesi global 2023 ini, pemerintah Indonesia khususnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dalam (Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, 2022) meluncurkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni: Pertama, mengantisipasi pembengkakan anggaran yang dikeluarkan dengan menganalisis dan mengidentifikasi pos-pos pengeluaran; Kedua, membentuk sebuah tim khusus yang bertujuan untuk mengatasi kenaikan inflasi di tingkat daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten bernama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); Ketiga, membentuk tim satuan tugas (satgas) bernama Satgas Pangan di daerah yang mempunyai tugas memantau dan mengawasi laju harga dan kesediaan komoditas daerah dan melaporkan secara berkala kepada pusat. Jika terjadi permasalahan seperti kenaikan harga, menurunnya pasokan maupun masalah pada suplai dan distribusi, Satgas Pangan ini wajib melaporkannya kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri RI; Keempat mendistribusikan BBM

subsidi lebih selektif dan hati-hati agar tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Sebesar 80% dari Rp502 subsidi BBM sarannya tidak tepat, ini merupakan evaluasi besar bagi pemerintah. Dalam mencapai keberhasilan langkah ini, pemerintah pusat akan mendorong pemda untuk bisa mengawasi secara cepat dengan bantuan penegak hukum daerah;

Selanjutnya yang kelima adalah membentuk sebuah gerakan penghematan energi yang bisa diikuti oleh masyarakat luas seperti menyalakan lampu hanya di malam hari. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memaksimalkan program transisi energi lama seperti batubara ke energi baru terbarukan (EBT). Salah satu contohnya dengan memasang panel surya untuk menyerap cahaya matahari dan menghasilkan energi listrik. Selain penghematan energi, pemerintah juga membentuk gerakan menanam tanaman yang cepat panen seperti cabai, bawang dan lain-lain untuk memenuhi kesediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini tentu perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari Bibinsa, Babinkamtibmas, dan PKK; Keenam, melakukan kolaborasi bersama pemerintah daerah dengan gerakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang berfokus pada pemasokan komoditas daerah. Mulai dari meriset komoditas pangan strategis dan saling membantu dan melengkapi komoditas antar daerah; Ketujuh, membangun dan memaksimalkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Bansos, anggaran Desa dan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Selain itu, pemerintah juga akan merealokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk anggaran Bansos Pusat; Kedelapan, konsisten dalam melaporkan angka inflasi secara berkala dari pusat hingga daerah melalui Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah; Dan kesembilan, memprioritaskan isu pengendalian inflasi agar seluruh stakeholder dan masyarakat dapat bersinergi bersama.

### **Simple Design and Continuous Refinement**

Prinsip *simple design and continuous refinement* memfokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan akan dapat memperoleh hasil yang cepat. Prinsip ini sangat sesuai dengan kebijakan fiskal didorong pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang berfokus untuk menjaga tingkat *output* perekonomian regional melalui langkah-langkah peningkatan level produktivitas regional. Implikasi atau *output* yang dihasilkan dari kebijakan fiskal ini memiliki nilai yang tinggi karena secara otomatis menyebar ke seluruh daerah Indonesia melalui pemerintah daerah. Dimana tujuan utamanya adalah mendistribusikan beban fiskal pusat sekaligus memberdayakan potensi perekonomian daerah dari dukungan infrastruktur jangka pendek. Dalam laporan (Dirjen Pertimbangan Kemenkeu, 2023), terdapat dua langkah strategis yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan fiskal ini. Pertama adalah membangun kerja sama ekonomi antar daerah. Kerja sama merupakan langkah mitigasi resesi global terbaik karena mengerahkan seluruh pemda baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. kolaborasi ini dapat berbentuk pertukaran barang dan jasa antar daerah, saling membantu melengkapi komoditas pangan atau bahan yang mampu meningkatkan produktivitas karena tidak memakan biaya produksi yang tinggi serta berujung bisa membuka kesempatan pasar baru sekaligus memperluas lapangan kerja baru.

Selanjutnya yang kedua adalah diversifikasi ekonomi berbagai sektor potensial. Diversifikasi ekonomi adalah suatu proses memvariasikan produk, usaha, investasi jenis aset dan sebagainya guna mengurangi risiko kegagalan di pasaran. Langkah ini dapat memperkuat ekonomi secara keseluruhan karena ketergantungan antar sektor dapat diminimalisasi dengan diversifikasi ekonomi. Beberapa sektor yang potensial untuk menjaga ketahanan ekonomi terhadap resesi global adalah: (1) Sektor pertanian, dimana Indonesia sendiri memiliki kawasan atau lahan pertanian yang sangat luas dan didukung oleh iklim tropis. Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan tanaman hortikultura, pertanian organik serta meningkatkan produksi dengan teknologi modern; (2) Sektor industri kreatif, yang merupakan sektor pendukung ekonomi Indonesia seperti kuliner, kerajinan, musik dan seni budaya; (3) Sektor pariwisata. Dengan keberagaman destinasi wisata, pulau-pulau dan budaya yang ada, hal tersebut menjadi potensi besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata dan memperluas pasar wisatawan baik domestic maupun mancanegara melalui diversifikasi; (4) Sektor industri manufaktur. Dengan tenaga kerja yang relatif murah dan kelimpahan sumber daya alam, hal tersebut menjadi potensi besar untuk mengembangkan sektor ini dengan peningkatan nilai tambah seperti pada industri elektronik, tekstil, otomotif dan lainnya melalui diversifikasi.

Menyambung dengan diversifikasi, pemerintah dalam hal penanganan ancaman resesi juga mengeluarkan kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional yang difokuskan pada komoditas seperti nikel dengan mengurangi ekspor bahan mentah. Menurut (Kemenko Perekonomian, 2023), Nikel merupakan salah satu komoditas di Indonesia yang memiliki jumlah cadangan besar, hal tersebut didukung dengan fakta yang diperlihatkan oleh Geological Survey yang menyatakan bahwa terdapat 21 juta ton atau setara dengan 22% cadangan global yang membuat cadangan nikel menempati peringkat pertama. Melalui industri hilirisasi, ekonomi negara Indonesia dipastikan dapat mengatasi tantangan resesi global karena komoditas nikel akan diekspor dengan nilai jual yang tinggi yang berbentuk barang setengah jadi atau jadi, bukan dalam bentuk mentah lagi. Selain untuk ekspor, hilirisasi industri berbasis SDA juga dapat meningkatkan kebutuhan domestik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

## Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia telah mengimplementasikan konsep *agile government* dalam menghadapi indikasi resesi yang terjadi pada tahun 2023 dengan baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan langkah atau kebijakan dalam menghadapi resesi 2023 dengan berlandaskan keenam prinsip dari teori *agile governance* yakni meliputi *good enough governance*, *business-driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach* dan *simple design and continuous refinement*. Hal tersebut dibuktikan dengan peresmian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2023 sebagai upaya pengintegrasian digital UMKM, APBN yang didesain untuk menghadapi ancaman resesi, penghimpunan masyarakat untuk membuka atau mengembangkan UMKM, perbaikan iklim investasi,

pengeluaran kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah, serta peluncuran beberapa langkah taktis oleh Kemendagri RI dalam merespon ancaman ini. Rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah dapat melakukan analisis efektivitas/*output* dari berbagai langkah/strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi 2023. Sehingga hasil dari analisis tersebut dapat mengungkapkan apakah langkah/strategi yang dilakukan itu tepat atau tidak serta dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara atau tidak.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada asisten dosen sekaligus dosen pembimbing dan pengampu salah satu mata kuliah bernama Kapita Selektta Pemerintahan dalam membantu penulisan naskah ini.

### Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

### Daftar Pustaka

- Alhakim, A., Sim, J., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya. *Wajah Hukum*, 5(2), 431. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.422>
- Apriliyanti, K., Latif, M. D. I., & Mutiarin, D. (2021). Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya. *Jurnal Transformative*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1>
- Badan Pusat Statistik, R. (2023). *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. Bps.Go.Id. bps.go.id
- Busri. (2022). *Implementasi Agile Governance Pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Pemerintahan Lan RI Makassar*. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31820-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31820-Full_Text.pdf)
- Cahyadi, A., & Soenarjanto, B. (2018). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 750–756. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1277>
- Damara, D. (2023). *Intip Strategi Sri Mulyani Tangkal Ancaman Resesi Global 2023*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230116/9/1618640/intip-strategi-sri-mulyani-tangkal-ancaman-resesi-global-2023>
- Dirjen Pertimbangan Kemenkeu, R. (2023). *Editorial: Mitigasi Transmisi Risiko Krisis Global 2023/24 melalui Penguatan Belanja Infrastruktur Daerah*.
- Fariz, M., & Nadjib, A. (2020). Learning to Be Adaptive Governance: An Overview Of The Response Of The Musi Banyuasin Regency Government During Of The Covid-19 Pandemic. In *The 3rd International Conference on Social Sciences & Humanities 2020 ICOSH3 2020. Indonesia* (Issue 1).

- [https://www.researchgate.net/publication/291974748\\_Analisis\\_Keperluan\\_Kurikulum\\_Pendidikan\\_Vokasional\\_Pelajar\\_Bermasalah\\_Pembelajaran\\_LD\\_di\\_Malaysia](https://www.researchgate.net/publication/291974748_Analisis_Keperluan_Kurikulum_Pendidikan_Vokasional_Pelajar_Bermasalah_Pembelajaran_LD_di_Malaysia)
- Febriani, A. R. (2022). *Hadapi Ancaman Resesi 2023, Pakar UGM Sarankan Hal ini*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6322797/hadapi-ancaman-resesi-2023-pakar-ugm-sarankan-hal-ini>
- Fiskal Kemenkeu, R. (2022). *Resesi*. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-resesi>
- Gaffar, U. H. (2022). Realisasi Vaksinasi Nasional Dalam Perspektif Agile Governance. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11(1), 94–103. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4206>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Kemenko Perekonomian, R. (2023). *Tingkatkan Daya Saing Nasional dan Ciptakan Multiplier Effect, Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel Terus Didorong Pemerintah*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4915/tingkatkan-daya-saing-nasional-dan-ciptakan-multiplier-effect-pengembangan-industri-hilirisasi-nikel-terus-didorong-pemerintah>
- Kumorotomo, W. (2019). *Agile Government (Pemerintahan Cergas)*. Mkp.Fisipol.Ugm.Ac.Id. <https://mkp.fisipol.ugm.ac.id/2019/11/19/agile-government-pemerintahan-cergas/>
- Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). *Agile Governance sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah*. Repository.Unmuhjember.Ac.Id. [repository.unmuhjember.ac.id](https://repository.unmuhjember.ac.id)
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. 1–22. <http://arxiv.org/abs/1505.06701>
- Mahdiyan, A. (2023). *Perekonomian Dunia Diprediksi akan Dihantam Resesi Tahun 2023, Bagaimana dengan Pembangunan Infrastruktur?* Kpbu.Kemenkeu.Go.Id. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur>
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, J., Sobari, W., & Hakim, M. L. (2022). Adaptive, Agile dan Robust Governance untuk Menjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Transformative*, 8(2), 238–263. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.5>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- News, I. (2022). *Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa Jadi Solusi Itu*. Its.Ac.Id. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/>
- Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, R. (2022). *10 Langkah Strategis Pemerintah Kendalikan Inflasi Daerah*. Babelprov.Go.Id.

- [https://babelprov.go.id/berita\\_detil/10-langkah-strategis-pemerintah-kendalikan-inflasi-daerah](https://babelprov.go.id/berita_detil/10-langkah-strategis-pemerintah-kendalikan-inflasi-daerah)
- PEN Kemenkeu, R. (n.d.). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Bing.Com. Retrieved June 16, 2023, from <https://www.bing.com/ck/a?!&p=e4c5455e92381c9eJmItdHM9MTY4NjQ0MTYwMCMZpZ3VpZD0xNDZmZjEyMy0wMmFILTY2MzktMjJjYS1lMTYyMDMwMjY3ZjkmaW5zaWQ9NTQzMw&ptn=3&hsh=3&fclid=146ff123-02ae-6639-22ca-e162030267f9&psq=program+pen+ada+apa+saja&u=a1aHR0cHM6Ly9wZW4ua2VtZW5rZ>
- Prijambodo, B. (2023). *Resesi Dunia 2023, Seberapa Parah?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/19/resesi-dunia-2023-seberapa-parah>
- Putri, C. A. (2022). *4 Negara Ini Bakal Resesi di 2023, Indonesia Aman?* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221204063045-4-393519/4-negara-ini-bakal-resesi-di-2023-indonesia-aman>
- Putri, S. B., Tamrin, M. H., Wahyuni, S., Rianto, B., Publik, A., Ilmu, F., Politik, S., Hang, U., & Surabaya, T. (n.d.). *AGILE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERUSAHAAN*. 9(1), 1–9.
- Rachman, A. (2023). *Kabar Buruk Dari Eropa: 5 Krisis Bisa Terjadi di 2023*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119123100-4-406759/kabar-buruk-dari-eropa-5-krisis-bisa-terjadi-di-2023>
- Romanti. (2023). *Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2023 Resmi Dimulai*. Itjen.Kemendikbud.Go.Id. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-gernas-bbi-2023-resmi-dimulai/#:~:text=Gernas BBI sendiri merupakan program,digital pada tahun 2024 mendatang.>
- Sagala, S., Azhari, D., Rosyidie, A., Annisa, S. N., Ramadhani, A. K., Vicri, R. N., & Mahardika, M. D. (2021). *COVID-19 in Indonesia: An Analysis of DKI Jakarta's COVID-19 Pandemic Response and Its Governance During the New Normal Period*. 514(Icoship 2020), 185–191. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.041>
- Sandi, F. B. (2023). *5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>
- Saragih, S. (2023). *Situasi Tidak Berubah, AS Menuju Resesi Keras atau Inflasi Tinggi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/29/situasi-tidak-berubah-as-menuju-resesi-keras-atau-inflasi-tinggi>
- Setiawan, E. F., Marzuki, F., Supriadi, Y. N., & Sumardjo, M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, E-Government dan Organisasi Agility Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di Lingkungan Politeknik Ilmu Pemasarakan dalam Menghadapi Era New Normal. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, IX(6), 2254–2271.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, Y. (2022). *Hadapi Resesi 2023, Ini Jurus yang Disiapkan Pemerintah*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2022/10/21/222900226/hadapi>

- resesi-2023-ini-jurus-yang-disiapkan-pemerintah
- U.S. Embassy, J. (2023). *Amerika Serikat dan Indonesia Tandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Senilai 10,2 Triliun Rupiah*. Id.Usembassy.Gov. <https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-dan-indonesia-tandatangani-kesepakatan-infrastruktur-dan-keuangan-senilai-102-triliun-rupiah/>
- Yanqing. (2010). E-government: Definition, Goals, Benefits and Risks. *International Conference Manag. Serv. Sci MASS*, 9–12.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.
- Zahra, N. S. A., Suparman, N., & Alia, S. (2022). Penerapan Prinsip Agile Governance dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6167–6178.
- Zulyani, E. P. (2020). Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 78. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i1.40717>

### Tentang Penulis

**Muhamad Iqbal Muttaqin** adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar tema Birokrasi Pemerintahan, Politik dan Kepemiluan, serta *Civil Society*.

**Ane Permatasari** adalah dosen tetap Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar tema Studi Gender, Politik Lokal, serta Manajemen Konflik.